

Strategi Politik *Divide et Impera* Pemerintah Kolonial Belanda Dalam Memperkuat dan Mempertahankan Kekuasaannya di Indonesia pada Abad Ke-17 Hingga Ke-19

Riyanty Ruth Melaty Angel Simanungkalit¹ Elina Sianturi² Mhd Annoer Rafiq³ Elman Wira Selamat Lafau⁴ Jeremy Arif Gonzales Tarigan⁵ Flores Tanjung⁶

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: riyanty.ruth26@gmail.com¹ ellinasianturio8@gmail.com² annoerrafiq44@gmail.com³ lafaelman@gmail.com⁴ jeremytarigan06@gmail.com⁵ flores_tanjung@yahoo.co.id⁶

Abstract

This study discusses the divide et impera political strategy implemented by the Dutch colonial government in strengthening and maintaining its power in the archipelago from the 17th to the 18th century. The purpose of this study is to analyze the implementation and impact of this political strategy on the power of local kingdoms in Indonesia. This study uses a qualitative method with a library research approach, utilizing various secondary sources such as books, journal articles, and relevant historical documents. The results of the study show that the divide et impera strategy was carried out by exploiting internal conflicts within kingdoms, building alliances with local rulers who were willing to cooperate, and exploiting social and political differences within society. The implementation of this strategy can be seen in several important historical events, such as the succession conflict in the Islamic Mataram Kingdom which led to the Giyanti Agreement, the competition between the Bone Kingdom and the Gowa Sultanate in the Makassar War, the power conflict in the Banten Sultanate between Sultan Ageng Tirtayasa and Sultan Haji, and the political power split in the Aceh Sultanate between the sultanate and the uleebalang. Through this strategy, the Dutch succeeded in weakening the political power of local kingdoms and expanding their influence in various regions of the archipelago. The impact of this policy was not only seen in the weakening of local royal powers, but also in the increase in political and economic dependence on the Dutch and the emergence of prolonged social conflicts within society.

Keywords: *Divide et Impera, Dutch Colonialism, Nusantara Kingdoms*

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi politik divide et impera yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya di Nusantara pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penerapan serta dampak dari strategi politik tersebut terhadap kekuatan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan), yang memanfaatkan berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi divide et impera dilakukan dengan memanfaatkan konflik internal kerajaan, membangun aliansi dengan penguasa lokal yang bersedia bekerja sama, serta memanfaatkan perbedaan sosial dan politik dalam masyarakat. Penerapan strategi ini dapat dilihat dalam beberapa peristiwa sejarah penting, seperti konflik suksesi di Kerajaan Mataram Islam yang berujung pada Perjanjian Giyanti, persaingan antara Kerajaan Bone dan Kesultanan Gowa dalam Perang Makassar, konflik kekuasaan di Kesultanan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, serta perpecahan kekuatan politik di Kesultanan Aceh antara pihak kesultanan dan para uleebalang. Melalui strategi tersebut, Belanda berhasil melemahkan kekuatan politik kerajaan-kerajaan lokal dan memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Nusantara. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terlihat pada melemahnya kekuatan kerajaan lokal, tetapi juga pada meningkatnya ketergantungan politik dan ekonomi terhadap Belanda serta munculnya konflik sosial yang berkepanjangan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Divide et Impera, Kolonialisme Belanda, Kerajaan Nusantara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara sejak abad ke-16 membawa banyak perubahan besar pada aspek politik, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat lokal. Salah satu bangsa Eropa yang memberikan dampak signifikan dalam sejarah Indonesia adalah Belanda, lewat perusahaannya dagangnya yang bernama Vereenigde Oostindische Compagnie, yang didirikan pada tahun 1602. Dengan perusahaan ini, Belanda menjalankan bukan hanya perdagangan tetapi juga kekuasaan politik di banyak daerah di Nusantara. Untuk menguatkan dan menjaga kekuasaannya, Belanda menggunakan berbagai strategi politik, di antaranya adalah politik *divide et impera* atau politik adu domba. Strategi *divide et impera* adalah metode yang dilakukan untuk memecah kekuatan musuh agar tidak bersatu melawan kekuasaan kolonial. Dengan memanfaatkan konflik di antara kerajaan, bangsawan, dan kelompok masyarakat, Belanda dapat mendapatkan keuntungan politik sekaligus memperluas pengaruhnya di Nusantara. Strategi ini terbukti efektif, karena pada waktu itu Indonesia terdiri dari banyak kerajaan dengan kepentingan dan kekuatan yang berbeda. Selama abad ke-17 hingga ke-18, Belanda banyak menggunakan politik *divide et impera* dalam berbagai konflik yang ada di Nusantara. Belanda seringkali mendukung satu pihak yang berselisih untuk mendapatkan dukungan politik dan kekuatan ekonomi. Contohnya terlihat dalam konflik di Kesultanan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperkuat posisinya di daerah tersebut. Selain itu, perpecahan di Kerajaan Mataram juga dijadikan kesempatan oleh Belanda, hingga muncul Perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan tersebut menjadi beberapa kekuasaan yang lebih kecil. Dengan menerapkan strategi *divide et impera*, Belanda berhasil melemahkan pengaruh politik kerajaan-kerajaan di Nusantara, sehingga mereka lebih mudah mengendalikan wilayah dan sumber daya yang ada. Kebijakan ini membawa dampak tidak hanya struktur kekuasaan politik tetapi juga menimbulkan konflik dan perpecahan yang berkepanjangan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara sistematis mengenai strategi politik *Dividen et Impera* yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam memperkuat dan mempertahankan kekuasaan di Indonesia pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah yang relevan dengan tema penelitian, termasuk analisis tentang kebijakan politik pada era Vereenigde Oostindische Compagnie. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang membahas pelaksanaan politik *divide et impera* dalam sejarah kolonial di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai pola dan bentuk penerapan strategi politik *Divide et Impera* oleh pemerintah kolonial Belanda dalam mempertahankan dominasi kekuasaannya di Indonesia pada abad ke-17 hingga abad ke-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik *Divide et Impera*

Politik *Divide et Impera* muncul di masa kolonial Belanda bukan terjadi mendadak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi politik dan ekonomi di Nusantara pada abad ke-17. Salah satu alasan utamanya adalah keinginan Belanda untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan meningkatkan pengaruh politik mereka dengan cara yang lebih sederhana dan efektif. Melalui organisasi dagang Vereenigde Oostindische Compagnie yang didirikan pada tahun 1602, Belanda berusaha memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Namun, untuk

mencapai tujuan tersebut, mereka harus menghadapi kekuatan dari berbagai kerajaan lokal yang cukup kuat. *Devide et impera* adalah taktik militer yang dijalankan oleh Belanda untuk menguasai suatu wilayah dengan memecah belah kelompok besar menjadi kelompok kecil yang lemah. Tujuannya guna meraih keuntungan material bagi Belanda. Sejak dulu, para penjajah memanfaatkan taktik ini untuk menguasai wilayah kolonialnya. Kelompok penjajah ini menjalankan taktik pecah belah dengan cara membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada kesamaan bahasa, etnis ataupun agama. Sederhananya, Belanda menggunakan populasi yang telah terpecah-pecah ke dalam segmen tertentu untuk menciptakan dominasi dan meraih keuntungan (Ahmad et al., n.d.)

Implementasi Politik *Devide et Impera*

Kebijakan *divide et impera* diterapkan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Memanfaatkan Konflik Internal. Belanda sering kali memperparah konflik internal yang sudah ada di kerajaan-kerajaan lokal. Misalnya, dalam konflik suksesi di kerajaan-kerajaan besar, Belanda sering memberikan dukungan kepada salah satu pihak untuk memperlemah lawan. Contohnya, dalam Kerajaan Mataram, Belanda terlibat dalam konflik suksesi pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Dengan mendukung salah satu pangeran, Belanda berhasil memperlemah Mataram dan akhirnya menguasai wilayah tersebut (Sitorus et al., 2024).
2. Membangun Aliansi dengan Penguasa Lokal. Selain memperparah konflik internal, Belanda juga membangun aliansi dengan penguasa-penguasa kecil. Mereka memberikan perlindungan kepada penguasa lokal yang bersedia bekerja sama dan memberikan konsesi perdagangan atau wilayah. Hal ini menciptakan ketergantungan penguasa lokal pada Belanda dan melemahkan posisi kerajaan besar yang ada.
3. Menyebarkan Diskriminasi dan Fragmentasi Sosial. Belanda juga memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan sosial yang ada di masyarakat Nusantara. Mereka membagi masyarakat berdasarkan etnis, seperti pribumi, Tionghoa, dan orang Eropa, serta memperlakukan mereka dengan kebijakan yang berbeda-beda. Tindakan ini menciptakan perpecahan di dalam masyarakat yang memperlemah potensi terjadinya pemberontakan besar-besaran.

Penerapan strategi *divide et impera* membuat kekuasaan Belanda di Indonesia mampu bertahan sangat lama, bahkan hingga lebih dari tiga abad. Walaupun sempat muncul berbagai perlawanan dari daerah, seperti Perang Diponegoro dan Perang Aceh, tidak ada kekuatan besar yang mampu mempersatukan seluruh wilayah Indonesia untuk melawan Belanda secara terorganisir. Perpecahan di antara kerajaan-kerajaan lokal menyebabkan kekuatan politik dan militer mereka menjadi lemah. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang mempermudah Belanda mempertahankan kekuasaan kolonialnya. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga meninggalkan dampak jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Politik pecah belah yang diterapkan Belanda tidak hanya berpengaruh pada masa kolonial, tetapi juga berlanjut hingga setelah Indonesia merdeka. Berbagai konflik yang berkaitan dengan etnis, agama, maupun kepentingan politik di sejumlah daerah dapat ditelusuri akarnya pada masa kolonial, ketika Belanda secara sengaja memecah belah Kerajaan yang dipecah belah oleh Belanda:

Kerajaan Mataram Islam

Masuknya Kolonialisme Belanda ke Mataram pada awalnya hadir di tanah Jawa sebagai mitra dagang bagi kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Mataram Islam. Hubungan ini bersifat saling menguntungkan pada tahap awal, di mana VOC mendapat akses komoditas penting seperti beras, gula, dan rempah-rempah, sementara pihak kerajaan memperoleh keuntungan

ekonomi dan akses ke pasar internasional (Fadira Masbait, 2025) Namun, dinamika berubah drastis ketika Kerajaan Mataram mengalami krisis politik besar, terutama pada masa pemerintahan Amangkurat I dan dilanjutkan oleh putranya, Amangkurat II. Salah satu titik kritis terjadi pada tahun 1677, ketika pecah pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya di wilayah Madura dan Jawa Timur. Pemberontakan ini bukan hanya mengancam stabilitas politik Mataram, tetapi juga mengguncang legitimasi kekuasaan pusat. Dalam keadaan terdesak dan kehilangan dukungan dari bangsawan-bangsawan lokal, Amangkurat II yang baru saja naik takhta terpaksa meminta bantuan militer dari VOC untuk menumpas pemberontakan. Kesepakatan ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara Mataram dan VOC. Dengan dalih memberikan perlindungan dan stabilitas, VOC mulai memperoleh konsesi politik yang sangat merugikan pihak kerajaan. Campur tangan VOC semakin kuat pada abad ke-18 ketika terjadi konflik perebutan takhta antara Amangkurat IV dan para pesaingnya. VOC kembali memanfaatkan konflik tersebut dengan memberikan dukungan kepada pihak yang dianggap menguntungkan bagi kepentingan mereka. Akibatnya, kekuasaan Mataram semakin melemah dan bergantung kepada VOC. Puncak dari politik *divide et impera* di Mataram terjadi pada 13 februari 1755 melalui Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini membagi wilayah Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III. Pembagian ini membuat kekuatan politik Jawa semakin terpecah sehingga VOC lebih mudah mengendalikan wilayah tersebut.

Kerajaan Bone

Penerapan strategi politik *divide et impera* oleh pemerintah kolonial Belanda juga terlihat dalam konflik yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Salah satu konflik penting yang dimanfaatkan oleh Belanda adalah persaingan antara Kerajaan Bone dan Kesultanan Gowa (Arifin et al., n.d.) Pada masa itu, Kesultanan Gowa berkembang menjadi kekuatan maritim yang sangat berpengaruh di kawasan Indonesia timur serta menjadi pusat perdagangan internasional yang terbuka bagi berbagai bangsa. Kondisi tersebut membuat Gowa menjadi salah satu kekuatan yang menentang monopoli perdagangan Belanda yang dijalankan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Di sisi lain, Kerajaan Bone yang merupakan kerajaan Bugis memiliki hubungan politik yang tidak stabil dengan Gowa. Ketegangan antara kedua kerajaan ini dipengaruhi oleh dominasi politik Gowa terhadap beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Bone. Situasi tersebut memunculkan perlawanan dari kelompok Bugis yang dipimpin oleh Arung Palakka yang berusaha membebaskan Bone dari pengaruh kekuasaan Gowa. Melihat adanya konflik kepentingan antara Bone dan Gowa, VOC memanfaatkan situasi tersebut sebagai peluang untuk menerapkan strategi *divide et impera*. VOC kemudian menjalin aliansi dengan Arung Palakka dengan memberikan dukungan militer dan politik untuk melawan kekuasaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Melalui kerja sama ini, VOC tidak hanya membantu Bone dalam menghadapi Gowa, tetapi juga memperkuat posisinya di kawasan Sulawesi Selatan. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi perang besar yang dikenal sebagai Perang Makassar. Dalam perang ini, pasukan gabungan VOC dan Bone berhasil mengalahkan kekuatan Gowa. Kekalahan tersebut memaksa Gowa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya yang memberikan berbagai keuntungan bagi VOC, terutama dalam hal penguasaan perdagangan dan pengaruh politik di wilayah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa VOC secara aktif memanfaatkan persaingan antar kerajaan lokal untuk memperkuat kekuasaannya. Dengan mendukung Kerajaan Bone dalam konflik melawan Gowa, VOC berhasil melemahkan salah satu kekuatan politik terbesar di kawasan tersebut sekaligus memperluas dominasi

ekonomi dan politiknya. Oleh karena itu, konflik antara Bone dan Gowa dapat dipahami sebagai salah satu contoh nyata penerapan strategi *divide et impera* oleh Belanda dalam upaya memperluas dan mempertahankan kekuasaan kolonialnya di Nusantara.

Kerajaan Gowa

Penerapan strategi politik *divide et impera* oleh Belanda juga dapat dilihat dalam konflik yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada abad ke-17, khususnya yang melibatkan Kesultanan Gowa. Pada masa itu, Gowa merupakan salah satu kekuatan maritim terbesar di kawasan Indonesia timur serta berperan sebagai pusat perdagangan internasional yang terbuka bagi berbagai bangsa. Kebijakan perdagangan yang terbuka tersebut menjadikan Gowa sebagai pesaing utama bagi monopoli perdagangan yang dijalankan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Kekuatan politik dan ekonomi Gowa mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ia dikenal sebagai penguasa yang menentang dominasi VOC serta berusaha mempertahankan kedaulatan dan kebebasan perdagangan di wilayahnya. Penolakan terhadap monopoli perdagangan Belanda menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Gowa dan VOC. Dalam menghadapi perlawanan tersebut, VOC tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan konflik politik yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Salah satu strategi yang digunakan VOC adalah menjalin kerja sama dengan Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka. Bone pada masa itu memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Gowa karena adanya dominasi politik Gowa di kawasan tersebut. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC untuk membentuk aliansi dengan Arung Palakka sebagai bagian dari strategi *divide et impera*, yaitu dengan memanfaatkan persaingan antara kerajaan-kerajaan lokal untuk melemahkan kekuatan Gowa. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi perang besar yang dikenal sebagai Perang Makassar. Dalam perang ini, pasukan VOC yang bersekutu dengan Bone berhasil mengalahkan kekuatan Gowa. Kekalahan tersebut memaksa Gowa menandatangani Perjanjian Bungaya yang memberikan berbagai keuntungan bagi VOC, terutama dalam hal monopoli perdagangan serta pengaruh politik di wilayah Sulawesi Selatan.

Kesultanan Banten

Penerapan politik *divide et impera* oleh Belanda juga terjadi di Kesultanan Banten. Kerajaan ini pada abad ke-17 merupakan salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara, terutama dalam perdagangan lada. Kekuatan ekonomi dan politik Banten membuatnya menjadi salah satu pesaing utama Belanda dalam menguasai jalur perdagangan di wilayah barat Nusantara. Oleh karena itu, Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) berusaha melemahkan kekuatan Banten dengan memanfaatkan konflik internal yang terjadi di dalam kerajaan. Konflik internal di Banten terjadi akibat persaingan kekuasaan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji pada akhir abad ke-17. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai penguasa yang menentang kehadiran VOC dan berusaha mempertahankan kedaulatan serta kebebasan perdagangan Banten. Sebaliknya, Sultan Haji memiliki hubungan yang lebih dekat dengan VOC dan bersedia bekerja sama dengan Belanda untuk memperkuat posisinya dalam perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Melihat konflik antara ayah dan anak tersebut, VOC memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi *divide et impera*. VOC memberikan dukungan politik dan militer kepada Sultan Haji untuk melawan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perang saudara di dalam Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan pasukan yang setia kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat kekalahan tersebut, Sultan Ageng akhirnya ditangkap dan kekuasaan Banten jatuh ke tangan Sultan Haji yang

didukung oleh VOC. Setelah peristiwa itu, VOC memperoleh berbagai hak istimewa dalam bidang perdagangan dan politik di Banten sehingga pengaruh Belanda di wilayah tersebut semakin kuat.

Kerajaan Aceh

Penerapan strategi politik *divide et impera* oleh Belanda juga dapat dilihat dalam konflik yang terjadi di wilayah Kesultanan Aceh. Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang kuat di Nusantara, terutama pada abad ke-16 hingga ke-17. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang berpengaruh di kawasan tersebut. Kondisi ini membuat Aceh menjadi salah satu wilayah yang dianggap penting oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya di Sumatra. Pada masa perkembangannya, Kesultanan Aceh memiliki hubungan politik yang kompleks dengan berbagai wilayah di sekitarnya. Di dalam struktur kekuasaan Aceh sendiri terdapat banyak pemimpin daerah yang disebut *uleebalang*, yaitu penguasa lokal yang memiliki kekuatan politik cukup besar di wilayahnya masing-masing. Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat kesultanan dengan para *uleebalang* sering menimbulkan ketegangan dan persaingan kekuasaan di dalam wilayah Aceh. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan strategi *divide et impera*. Melalui kebijakan politik dan militer, Belanda berusaha memanfaatkan perbedaan kepentingan antara pihak kesultanan dan para *uleebalang*. Dalam beberapa kasus, Belanda memberikan dukungan kepada kelompok *uleebalang* tertentu untuk melemahkan kekuasaan pusat kesultanan. Dengan cara ini, Belanda dapat memperbesar pengaruhnya di wilayah Aceh tanpa harus sepenuhnya menghadapi kekuatan kesultanan secara langsung. Konflik antara kelompok yang mendukung kesultanan dengan kelompok *uleebalang* yang bekerja sama dengan Belanda semakin terlihat pada masa terjadinya Perang Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan perpecahan internal dalam masyarakat Aceh untuk melemahkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Strategi ini membuat Belanda secara bertahap mampu memperluas pengaruh politiknya di wilayah Aceh.

Penerapan politik *Divide et Impera* oleh Belanda membawa dampak yang sangat besar terhadap struktur politik di Nusantara. Salah satu dampak yang paling jelas adalah melemahnya kekuatan kerajaan-kerajaan lokal yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan politik di berbagai wilayah. Perpecahan yang terjadi akibat konflik internal maupun campur tangan Belanda membuat kerajaan-kerajaan tersebut kehilangan stabilitas politik dan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatannya. Selain itu, politik pecah belah juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan lokal. Banyak penguasa daerah yang sebelumnya memiliki otonomi cukup besar akhirnya harus berada di bawah pengaruh atau pengawasan pemerintah kolonial. Dalam beberapa kasus, Belanda bahkan menempatkan penguasa lokal sebagai bagian dari sistem administrasi kolonial yang berfungsi untuk membantu menjalankan kebijakan pemerintah kolonial di daerah. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah munculnya ketergantungan ekonomi dan politik terhadap Belanda. Melalui berbagai perjanjian yang dibuat setelah konflik atau perang, kerajaan-kerajaan lokal sering kali harus memberikan berbagai konsesi kepada Belanda, seperti hak monopoli perdagangan, penyerahan wilayah, maupun kewajiban membayar upeti. Kondisi ini semakin memperkuat posisi Belanda sebagai kekuatan dominan di Nusantara.

KESIMPULAN

Strategi politik *divide et impera* yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara pada masa abad ke-17 hingga abad ke-18 merupakan salah satu cara untuk

memperkuat dan mempertahankan kekuasaan mereka. Melalui organisasi dagang Vereenigde Oostindische Compagnie, Belanda tidak hanya melakukan perdagangan, tetapi juga turut campur dalam urusan politik di berbagai kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Strategi divide et impera dilakukan dengan cara memanfaatkan konflik internal yang terjadi di dalam kerajaan, membangun aliansi dengan penguasa lokal yang bersedia bekerja sama, serta memanfaatkan perbedaan sosial, etnis, dan politik dalam masyarakat. Dengan cara itu, Belanda berhasil melemahkan kekuatan para raja lokal, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bersatu dan melawan pemerintahan kolonial. Penerapan politik ini dapat dilihat dalam berbagai peristiwa sejarah di beberapa kerajaan di Nusantara, seperti konflik suksesi di Kerajaan Mataram Islam yang berujung pada Perjanjian Giyanti, persaingan antara Kerajaan Bone dan Kesultanan Gowa yang dimanfaatkan Belanda dalam Perang Makassar, konflik kekuasaan di Kesultanan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, serta perpecahan kekuatan politik di Kesultanan Aceh antara pihak kesultanan dan para uleebalang. Dalam setiap kasus tersebut, Belanda memanfaatkan konflik yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi sekaligus memperluas pengaruhnya di daerah tersebut. Dampak dari penerapan politik divide et impera memiliki pengaruh besar terhadap kondisi politik dan sosial di Nusantara. Kebijakan ini membuat kekuatan kerajaan-kerajaan kecil menjadi berkurang, meningkatkan ketergantungan politik dan ekonomi pada Belanda, serta menyebabkan perpecahan yang berlangsung lama di dalam masyarakat. Pada akhirnya, keadaan tersebut memudahkan Belanda untuk mempertahankan dominasi kekuasaannya di Indonesia dalam jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Agama Islam Negeri Kerinci, I., Yudha, G., & Islam Negeri Raden Intan gesityudha, U. (n.d.). Strategi Politik Devide Et Impera Belanda Dan Relevansinya Dengan Polarisasi Agama Pasca Pilpres 2019 Di Indonesia. 18(2), 2022. Retrieved <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>
- Arifin, F., Tinggi, S., Adab, I., Islam, B., & Ulum, R. (n.d.). Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan.....| 1 Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811.
- Fadira Masbait, S. (2025). The Influence Of Dutch Colonialism On The Development Of The Islamic Mataram Kingdom In Java, 1749-1755. In *Journal of Historical Education Studies* (Vol. 3, Number 1). <https://fahruddin.org/satmata>
- Sitorus, O., Gurusinga, S., Sinaga, R., & Pendidikan Sejarah, J. (2024). AR RUMMAN-Journal of Education and Learning Evaluation Devide Et Impera: Kebijakan Politik Belanda Dalam Memecah Persatuan di Nusantara. Desember, 1(2), 315.